

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Cina Merupakan salah satu negara di Asia Timur yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Progresitas bangkitnya perekonomian Cina tersebut tidak lepas dari aspek sosio-historis dan tingkat peradaban (*civilization*) negara ini memang telah maju sebelum periode masehi. Pasca sejarah perekonomian, pada tahun 1978 kondisi perekonomian Cina mengalami perubahan secara fundamental akibat program reformasi yang dijalankan oleh figur pembaharu Cina, Deng Xiaoping.¹

Bukan hanya itu salah satu batu loncatan perekonomian Cina yaitu terjadi pada masa revolusi Mao Zedong, yang sebelumnya tatanan masyarakat Cina yang cenderung kaku dan kental akan doktrinisasi yang berefek dari feodalisme pada akhirnya menganut paham Marxisme ala Maoisme.² Setelah paham Marxisme ala Maoisme menjadi pembangunan ala sosialisme bagi Cina. Akhirnya sistem pembangunan ala sosialisme seperti itu menuai banyak keluhan serta protes kepada pemerintahan Mao-Zedong karena gagal menciptakan pertumbuhan ekonomi yang agresif dan berefek terhadap terjadinya krisis besar di Cina, salah satu hal itu terjadi dikarenakan Cina cenderung tertutup pada negara-negara Barat maupun negara-negara yang bertolak belakang dengan ideologi sosialisme.

Melalui dinamika ekonomi yang panjang, Cina akhirnya menjadi salah satu negara di Asia yang memiliki ekonomi yang sangat kuat dan sekaligus mengalami tingkat ekonomi yang maju dengan pesat yang dikenal dengan sebutan "*miracle of economic growth*". Peran Deng Xiaoping sebagai figur pembaharu pada tahun 1989 menumbuhkan semangat baru dalam perekonomian Cina. Pada awalnya perekonomian Cina

¹ Ezra F. Vogel, 2013, *Deng Xiaoping and Transformation of China*, Beiknap Press of Harvard University, New York, hal.29

² Agung Leo, *Sejarah Asia Timur 2*, Surakarta: Ombak, 2006

bercorak sangat dogmatis beralih menjadi perekonomian yang sangat pragmatis dan terbuka³

Secara demografis dan geografis Cina merupakan negara yang memiliki populasi yang sangat padat di dunia, dengan total penduduk hampir 140 juta jiwa dengan luas wilayah 9.596.961 km². Hal ini menyebabkan efek yang tidak baik bagi kondisi perekonomian negara Tiongkok dengan kepadatan jumlah penduduk yang terlihat tidak stabil, maka akan berefek buruk bagi perekonomian Cina dalam jangka waktu yang panjang.

Secara demografi Cina bukan hanya negara dengan jumlah penduduk yang terpadat di dunia. Namun, Cina juga merupakan negara yang memiliki masalah yang sama dengan negara maju lainnya. Yaitu *Over Produce*, Cina dengan kelebihan produksi yang dialami di negaranya merupakan salah satu tantangan bagi Cina untuk segera menyelesaikannya. Salah satunya hal itu terjadi pada tahun 2016, ketika itu Cina mengalami kelebihan dalam memproduksi baja sehingga melakukan manuver pasar dengan menjual baja-bajanya di harga dibawah rata-rata. Hal itu menyebabkan Amerika Serikat untuk memperingatkan Cina untuk mengurangi produksi baja di negaranya.

Paska pembangunan Sosialisme ala Mao dianggap gagal membawa kesejahteraan bagi Cina, sehingga beberapa dekade selanjutnya Cina mendapatkan harapan baru dikarenakan gagasan ekonomi politik modernisasi sosialisme-liberalis ala Deng Xiaoping berdampak positif bagi perekonomian rakyat Cina dimasa itu. Gagasan tersebut meningkatkan kerjasama perekonomian antara Cina-Barat yang terjadi di tahun 1978-1986 merupakan awal terbukanya Cina terhadap ekonomi Internasional dengan tahap awal diberlakukannya zona ekonomi

³ Dogmatis ialah suatu pendekatan atau keyakinan yang dijalankan berdasarkan pada dogma (doktrin) yaitu sebuah dalil atau azas yang harus dipercayai begitu saja, sedangkan pragmatis ialah sebuah tindakan yang berorientasi pada kepraktisan tanpa mengurangi esensi dari tujuan tujuannya. BN. Maribun, 2005, *Kamus Politik, : Edisi Baru*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal.139 dan 450

khusus.⁴ Tahun-tahun selanjutnya Cina melakukan beberapa kontrak investasi dengan investor asing, membuka perdagangan dengan Amerika Serikat, serta masuknya Cina sebagai salah satu anggota WTO (*World Trade Organization*).

Menurut seorang analis dari *Asia Times* Richard Javad Hedarian. Selain perekonomian Cina yang semakin kuat, sengketa yang terjadi antara Trump selaku presiden Amerika Serikat dengan Duterte selaku ketua ASEAN sekaligus presiden Filipina merupakan peluang besar di tahun 2017 yang mendukung upaya Cina mendapatkan orientasi kerjasama dalam bidang ekonomi dari negara-negara Asia Tenggara yang bertujuan untuk menciptakan tatanan regional Sino-sentris yang baru. Bukan hanya itu Cina juga memanfaatkan blok regional sebagai tameng *de facto* untuk melawan rival terbesarnya yaitu Amerika Serikat. (Heydarian, 2017)

Sejauh ini, Cina terus melakukan ekspansi dalam pasar Internasional dengan memaksimalkan kerjasama sama ekonomi melalui program pengembangan regional yang digagasnya dengan negara-negara di Asia Tenggara. Hal itu dibuktikan dengan diciptakannya beberapa program pengembangan regional seperti *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB), *Maritime Silk Road Initiative* (MSR) dan *Belt and Road Initiative* (BRI) yang totalnya bernilai \$1 triliun. Tidak hanya menggagas program pengembangan regional yang baru, Cina juga mendukung kesepakatan perdagangan bebas *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) yang bertujuan mengintegrasikan secara lebih lanjut ekonomi di dalam 16 negara yang berada di bibir kawasan Asia Pasifik. Namun kebijakan tersebut tidak disetujui oleh AS dengan reaksi menolak perdagangan bebas multiateral yang mendukung pakta bilateral selama di KTT APEC. Yang menurut presiden Cina bahwa globalisasi merupakan “tren historis yang tak dapat diubah”.

Namun disaat yang sama, agresifitas Cina dalam membangun serta mengembangkan hubungannya dengan negara-

⁴ Shaun Breslin, *China and the Global Political Economy*, Great Britain: Antony Rowe Ltd, Chippenham and Eastbourne, 2007, hal. 83

negara lain dilihat sebagai kemajuan yang pesat dari strategi perekonomiannya, hal tersebut berbeda bagi Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Donald Trump banyak memberikan kejutan bagi dunia internasional dengan pengunduran diri dari TPP (Trans Pacific Partnership) yang dirasa sebagai salah satu keputusan yang salah bagi AS. Dengan tindakan yang diperlihatkan oleh AS cenderung menarik diri dari hubungan multilateral di Asia Pasifik, oleh karena itu RCEP (*Regional Comprehensive Economic Partnership*) yang merupakan bentuk insiatif dari Cina yang tanpa melibatkan AS, dan begitu juga sebaliknya TPP yang di bentuk oleh AS tanpa melibatkan Cina yang dimana AS sendiri telah keluar dari hubungan multilateral tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang diuraikan diatas, maka penulis melihat bahwa permasalahan dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan dalam suatu pertanyaan sebagai berikut :

“Mengapa Cina berkompetisi dengan Amerika Serikat di Asia Tenggara?”

C. Landasan Konseptual

1. National Interest (Hans J. Morgenthau)

National Interest (Kepentingan Nasional) adalah ialah merupakan tujuan tujuan yang ingin dicapai yang berkolerasi dengan kebutuhan banga/negara atau yang berhubungan dengan hal-hal yang di cita-citakan. Kepentingan nasional yang tetap melekat pada semua negara/bangsa ialah keamanan (meliputi kelangsungan hidup rakyat dan kebutuhan wilayah serta kesejahteraan). Dua hal pokok ini meliputi keamanan dan kesejahteraan. Yang dimana kepentingan nasional di identifikasikan dengan “tujuan nasional”.

Hans J. Morgenthau berasumsi bahwa kepentingan nasional ialah; Kemampuan minimum negara-negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan cultural dari negara-negara lain. Disebabkan oleh hal itu

sebuah negara dapat mengeluarkan sebuah kebijakan spesifik terhadap negara lain yang berbentuk seperti kerjasama maupun konflik.⁵

Dalam hal ini kepentingan dan kepentingan nasional ialah hal yang berbeda walaupun sebenarnya berkolerasi. Kepentingan merupakan suatu hal yang ingin dicapai sedangkan kepentingan nasional merupakan kepentingan negara yang dilaksanakan oleh pembuat keputusan terhadap negara lain dengan tujuan merealisasikan agendak-agenda yang ditentukan sebelumnya. *National Interest* terbagi kedalam dua kategori yaitu kepentingan praktis (jangka pendek) dan kepentingan kontinuitas (jangka panjang/berlanjut).

National Interest dalam jangka pendek/kepentingan praktis merupakan kebutuhan kepentingan negara yang mendesak yang berkaitan dengan eksistensi keberlangsungan negara dan yang bersifat seketika (*intans*), sedangkan kepentingan jangka panjang merupakan kepentingan nasional yang diperoleh melalui hubungannya dengan negara lain bersifat berkelanjutan (*continues*). Hal ini berkolerasi dengan asumsi Benjamin Jowet yang berpendapat bahwa :

“The state come into existence originating in teh bare needs of life and continuing in existence for the sake of good life”. (negara mendapatkan eksistensinya berdasarkan pada kebutuhan hidup yang mendesak dan kemudian tetap di perlukan keberadaanya untuk membina kehidupan yang lebih baik).⁶

Sedangkan menurut Donald E. Nuechterlin menyebutkan klasifikasi kepentingan nasional terbagi menjadi 4 jenis yaitu;⁷

⁵ A. Colombus, Theodore dan H. Wolfe, James. 1999. Pengantar Hubungan internasional : *Keadilan dan Power*. Bandung: Putra Abardin. Hlmn 115

⁶ Benjamin Jowett, 2003, *The Modern Library* dalam May Rudi, Pengantar Ilmu Politik: *Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya*, Refika Aditama, Bandung, hal 64

⁷ Rudy, D. T. (2000). Studi Strategis Dalam Transformasi System Internasional Pasca Perang Dingin. Bandung: PT. Rafika Aditama. Hlmn 62

1. Kepentingan pertahanan diantaranya menyangkut kepentingan untuk melindungi warga negaranya serta wilayah dan sistem politiknya dari ancaman negara lain.
2. Kepentingan ekonomi yang berhubungan dengan kepentingan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian negara melalui hubungan ekonomi dengan negara lain.
3. Kepentingan tata internasional yang mana kepentingan untuk mewujudkan dan mempertahankan sistem politik dan ekonomi internasional yang menguntungkan bagi negaranya.
4. Kepentingan ideologi yang berkaitan dengan ideologi atau pandangan hidup (*way of life*)

Kerjasama Internasional dan ekonomi merupakan merupakan perwujudan kepentingan Nasional, sehingga antara kerjasama internasional dan ekonomi merupakan hal yang tak bisa dipisahkan. Kerjasama internasional dan kepentingan ekonomi harus dijalankan melalui kontak dengan negara lain harus dijalankan melalui mekanisme rencana yang komprehensif (berketindak-lanjutan) yang didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman untuk menjalankan kontak dengan negara lain sehingga kepentingan nasional merupakan hal yang berpengaruh kuat terhadap eksistensi suatu bangsa.

Dari paparan teori kepentingan nasional diatas maka pendekatan ini dapat diaplikasikan tentang motif Cina untuk menyusun strategi melengserkan Amerika Serikat di Asia Tenggara melalui program pengembangan regional untuk menjawab tantangan perekonomian yang dimiliki oleh Cina karena menjadi negara yang kelebihan produksi dan menginisiasikan untuk memiliki hubungan yang baik dengan negara-negara Asia Tenggara yang cenderung konsumtif sekaligus untuk menyingkirkan rivalnya Amerika Serikat. Sehingga menjadi awal yang baik bagi Cina untuk menguatkan posisinya untuk menggapai posisinya sebagai Super Power di Asia Tenggara serta menggeser ketergantungan negara-negara di Asia Tenggara yang dulu

pro Amerika Serikat yang kini cenderung meningkatkan hubungannya dengan Cina.

Sejarah kejayaan masa lalu yang dimiliki oleh Cina menjadi motivasi bagi Cina dan para *stakeholder* lainnya dengan memperluas hegemoni ekonomi politik dan kerjasama internasional melalui program pengembangan regional. Program pengembangan regional ini merupakan agenda Internasional yang dimiliki oleh Cina yang dikembangkan dengan para stakeholder untuk menjangkau pasar Asia Tenggara yang lebih masif lagi.

Kebijakan ini merupakan aksi nyata yang dilakukan oleh Cina guna menggeser posisi dunia Amerika Serikat sebagai *super power* di Asia Tenggara yang sering di mainkan oleh Amerika Serikat dalam dunia Internasional. Oleh Karena itu Cina hadir dengan cara yang berbeda, dengan menginisiasikan me bentuk program pengembangan regional yang pro aktif untuk membangun hubungan yang baik dan aktif dengan negara-negara Asia Tenggara dalam jangka panjang. Hal ini secara otomatis menggeser keberpihakan dunia Internasional dalam hal *finance* dan orientasi geoeкономи Asia Tenggara. Hal ini juga menunjukkan kedewasaan ekonomi yang dimiliki oleh Cina dengan menjadikan program pengembangan regional sebagai tawaran kepada negara-negara Asia Tenggara dan negara berkembang yang memiliki masalah yang umum terkait Infrastruktur, dan aspek ekonomi mendasar lainnya yang secara langsung menyentuh aspek finansial negara-negara di Asia Tenggara.

2. **Decision Making** (William D. Coplin)

Menurut Coplin, untuk dapat memahami mengapa suatu negara berperilaku sejalan dengan wilayah kepentingan mereka, kita harus memahami juga faktor yang melatarbelakangi para pemimpin mereka membuat keputusan tersebut. Setiap kebijakan luar negeri yang dikeluarkan dapat dilihat sebagai hasil dari tiga kategori pertimbangan yang mempengaruhi kebijakan luar negeri negara-negara pengambil keputusan. Yang pertama ialah

kondisi politik domestik dalam kebijakan negara-negara pengambil keputusan. Yang kedua adalah kemampuan ekonomi dan militer negara. Yang ketiga adalah konteks internasional, posisi tertentu di mana negara itu menemukan Negara sahabat yang kuat dan negara yang mampu memenuhi kebutuhannya, khususnya mengenai hubungannya dengan negara lain dalam suatu sistem tertentu. (Coplin, 1971)

Oleh karena itu Coplin merumuskannya dengan tiga kategori pertimbangan yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara : (Coplin, 1971)

a. Situasi Politik Domestik

Politik dalam negeri hanyalah seperangkat determinan yang bekerja dalam politik luar negeri negara-negara. Walaupun keterbukaan suatu sistem politik atau tingkat stabilitas dalam negeri yang dialami oleh sistem itu bisa membentuk aspek-aspek politik luar negeri tertentu, faktor-faktor lain juga bisa bekerja didalamnya. Kita bisa mencontohkan kepribadian pengambil keputusan atau struktur konsep internasional. faktor-faktor lain itu.

b. Situasi Ekonomi dan Militer Domestik

Adalah suatu negara harus memiliki kemampuan dan kesediaan untuk menciptakan kemampuan yang diperlukan untuk menopang politik luar negerinya. Termasuk faktor geografis yang selalu mendasari pertimbangan pertahanan dan keamanan.

c. Konteks Internasional

Konteks Internasional memiliki tiga elemen penting dalam membahas dampak konteks internasional terhadap politik luar negeri suatu negara, yaitu: geografis, ekonomi, dan politik. lingkungan internasional setiap negara terdiri atas lokasi yang didudukinya, dalam kaitannya dengan negaranegara lain dalam sistem itu; dan juga hubungan-hubungan ekonomi dan politik antara negara itu dengan negara-negara lain.

Tidak hanya sampai disitu saja, Coplin sendiri membagi dalam tiga model dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri, yaitu: *The democratic model*, *pluralist model*, atau *ruling elite*. Yakni: (Coplin, 1971)

a. *Democratic model*

Model ini berpegang bahwa suatu kebijakan itu merefleksikan pilihan-pilihan publik melalui proses pemilu dan institusi-institusi perwakilan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pandangan ini, berbagai kebijakan diformulasikan 'by the people and for the people', dan pemerintah adalah penyambung mulut terpercaya masyarakat.

b. *Pluralist model*,

Pada model ini mayoritas publik tidak mendapat informasi, tidak tertarik, dan tidak pula aktif dalam *decision-making process*. Pengaruh mereka ada ditangan kelompok-kelompok kepentingan, masing-masing merepresentasikan satu bagian dari masyarakat. Pembuatan keputusan terdiri dari *bargaining and compromise* diantara pusat-pusat persekutuan kekuasaan. Kekuasaan terdesentralisasi, didistribusikan dalam beberapa segi, seperti kesejahteraan, pengetahuan, dan kepentingan.

c. *Ruling elite model*

Model ini berasumsi bahwa keberadaan elit politik yang relatif kecil dan bersatu akan menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan kepentingan-kepentingannya melalui pilihan-pilihan kebijakannya. Elit terkadang terdiri dari sedikit keluarga kaya, terkadang berbentuk apa yang disebut "military industrial complex", mungkin juga aktor-aktor dari kelompok yang lebih berbeda. Para elit pada dasarnya konservatif dan hanya akan menyetujui perubahan perubahan yang menguntungkan dalam kebijakan.

Menurut D.Coplin juga menjelaskan *policy influencer system* merupakan aktor politik domestik dalam pengambilan keputusan. Hubungan antara pengambil keputusan dengan

policy influencers terjadi secara timbal balik. Di satu sisi, pengambil keputusan membutuhkan *policy influencers* karena mereka merupakan sumber dukungan. Disisi lain, *policy influencers* membutuhkan pengambil keputusan untuk mempermudah jalan putusan sebagai suatu kebijakan. Apabila tuntutan *policy influencers* tidak dipenuhi pengambil keputusan, maka dapat dipastikan sebagian atau bahkan seluruh dukungan *policy influencers* kepada pengambil keputusan akan hilang. Pengambil keputusan tidak selalu menanggapi tuntutan itu secara positif. Tetapi, para pengambil keputusan pada akhirnya akan mengakomodasi sampai batas tertentu untuk bisa mengabaikan tuntutan itu.

Coplin membedakan *policy influencers* menjadi empat macam: (Coplin, 1971)

- a. *Bureaucratic influencer*, beberapa individu atau organisasi dalam lembaga pemerintah yang membantu para pengambil keputusan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan luar negeri. Anggota birokrasi yang bertindak sebagai *policy influencer* kadang juga menjadi pengambil keputusan. *Bureaucratic influencer* memiliki akses langsung kepada para pengambil keputusan dengan memberikan informasi kepada mereka sekaligus melaksanakan kebijakan luar negeri yang diputuskan. Karenanya, *bureaucratic influencer* memiliki pengaruh sangat besar dalam pengambilan keputusan.
- b. *Partisan influencer*, kelompok yang bertujuan untuk menerjemahkan tuntutan-tuntutan masyarakat menjadi tuntutan-tuntutan politis terkait kebijakan pemerintah. Mereka berupaya mempengaruhi kebijakan dengan cara menekan para penguasa dan dengan menyediakan orang-orang yang bisa berperan dalam pengambilan keputusan. Misalnya partai politik dalam system demokrasi.
- c. *Interest influencer*, yakni sekelompok individu yang bergabung bersama karena mempunyai kepentingan sama. *Interest influencer* memakai beberapa metode untuk membentuk dukungan terhadap kepentingannya. Mereka biasanya melancarkan kampanye dengan

menulis surat yang tidak hanya diarahkan kepada para pengambil keputusan, tapi juga *bureaucratic* dan *partisan influencer*. Mereka juga bisa menjanjikan dukungan finansial atau mengancam menarik dukungan. Jika tidak berperan dalam menentukan kebijakan luar negeri, *interest influencer* pasti berperan dalam mengkritisi para pengambil keputusan kebijakan luar negeri.

- d. *Mass influencer*, yang terwujud dalam opini publik yang dibentuk oleh media massa. Para pengambil keputusan menggunakan opini publik bukan untuk membentuk kebijakan luar negeri tapi untuk merasionalisasinya. Pendapat dari kelompok ini sering menjadi pertimbangan para pengambil keputusan untuk menyusun kebijakan luar negeri. Keempat tipe *policy influencers* itu tidak selalu memiliki pandangan sama terhadap suatu kebijakan. Perbedaan juga kerap dimiliki dengan para pengambil keputusan.

Dalam model pengambilan keputusan kebijakan luar negeri ini, lingkungan internasional bertindak sebagai rangsangan bagi para pengambil keputusan serta bagi *policy influencers*. Oleh karena itu kepentingan yang tertinggi yang dilakukan oleh Cina dengan tindakan *All Out* untuk masuk lebih kedalam dan terus melakukan upaya sebagai kompetitor Amerika Serikat. Caplin sendiri menyatakan jika kebutuhan pembuatan keputusan bukanlah terjadi begitu saja, namun kondisi yang terjadi dalam suatu negara itulah serta dinamika politik dalam negeri hingga Internasional berlaku seperti apa, sehingga kondisi aksi reaksi dalam politik internasional akan terus terjadi, walaupun akan lebih baik ataupun bisa berbanding buruk juga akhirnya.

D. Hipotesa

Cina berkompetisi dengan Amerika Serikat untuk menjadi super power di Asia Tenggara karena :

1. *Conflict interest* antara Cina dan Amerika Serikat di bidang ekonomi dalam aspek pembangunan serta meningkatkan hubungan dengan negara/wilayah lain, dalam bentuk

meningkatkan kerjasama ekonomi seperti perdagangan, investasi, kemaritiman untuk jangka panjang dengan negara-negara Asia Tenggara melalui program pengembangan regional. Hal tersebut terjadi demi terwujudnya re-orientasi yang awalnya pro-AS menjadi pro-Cina dalam apek ekonomi.

E. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu metode yaitu metode yang menitik beratkan pada analisa data-data yang sifatnya non-angka dan tanpa menggunakan rumus-rumus statistik sebagai metode pendekatannya.⁸

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang penulis gunakan ialah metode pengumpulan data sekunder, yaitu penulis tidak menjalankan observasi langsung di lapangan namun berdasarkan pada data yang telah tersedia, dengan melakukan telaah pustaka pada sejumlah literatur yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu antara lain :⁹

- a. Buku-buku
- b. Jurnal dan dokumen
- c. Majalah dan surat kabar
- d. Artikel-artikel dan data dari internet (*website*)

3. Metode Analisa

Metode analisa dalam penulisan dalam penulisan ini adalah menggunakan tipe analisa deskriptif kualitatif dengan memberikan gambaran yang bersifat penjelasan secara nyata dan perkembangan tentang kepentingan China membuat program pengembangan regional.¹⁰

⁸ Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian : Suatu pendekatan Praktik*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, hal. 12.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Catherine Cassel and Gillian Symon (editor), 1994, *Qualitative Methods Organizational Research*, London : Sage Publications, hal.3-4

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab perumusan masalah serta membuktikan hipotesa tentang alasan Cina untuk memutuskan membuat program pengembangan regional sebagai alat untuk berkompetisi dengan Amerika Serikat sebagai super power di Asia Tenggara.
2. Untuk mengetahui tentang progresifitas hubungan luar negeri Cina dalam hal finance dan perkembangan liberalisasi perekonomian Cina yang secara khusus dengan terobosan pembuatan program pengembangan regional yang secara pasti memperkuat hubungan Cina dengan negara lain yang pada saat ini berjalan sangat masif, jika dibandingkan dengan zaman kepemimpinan yang dahulu yang mengadopsi pembangunan sosialis ala maoisme.

G. Jangkauan Penelitian

Dalam rangka memberi batasan agar penulisan skripsi ini tidak meluas, maka penulis menspisifikasikan penulisan ini dengan melihat kontestasi yang terjadi antara Cina – Amerika Serikat yang terfokus dalam kontestasi program pengembangan regional dan sektor akuisisi pasar asia tenggara yang dimiliki oleh Cina dan Amerika Serikat. (krasner, 1998).

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang terbagi masing-masing sebagai berikut:

Bab I Skripsi merupakan pendahuluan dengan konten latar belakang, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian, tujuan penulisan, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab yang menjelaskan tentang latar belakang terbentuknya program pengembangan regional dan perkembangan program pengembangan regional.

Bab III merupakan bab yang membahas tentang alasan budang ekonomi, Cina dalam memutuskan untuk mengembangkan program oengembangan regional dengan

meningkatkan kerjasama dengan negara Asia tenggara dan negara berkembang lainnya.

Bab IV merupakan bab yang membahas tentang kepentingan ekonomi politik Amerika Serikat dan Cina di Asia Tenggara yang berfokus pada kebijakan dan kontestasi dari semua lini perekonomian, kemaritiman, politik hingga militer yang berada di Asia Tenggara.

Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari uraian pembahasan bab-bab sebelumnya.